

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP) merupakan salah satu indikator makroekonomi yang hingga saat ini masih digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian di suatu negara (Samuelson dan Nordhaus, 2001: 43). Dengan mengukur persentase perubahannya pada PDB yang disebut pertumbuhan ekonomi, akan diketahui seberapa besar dampak ataupun pengaruh dari suatu kebijakan ekonomi terhadap kinerja perekonomian di suatu negara. Salah satu kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan topik pertumbuhan ekonomi adalah kebijakan fiskal. Aktivitas pemerintah dapat mempengaruhi perekonomian melalui penarikan pajak ataupun pemberian transfer. Dalam suatu model perekonomian terbuka, pertumbuhan ekonomi juga diukur atau diperhatikan berdasarkan pengaruh hubungan perdagangan internasional yang ditunjukkan melalui aktivitas ekspor dan impor (Alkadri, 1999: 1-2).

Dalam konteks perekonomian regional, pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kinerja perekonomian makro yang terdapat di suatu daerah (Kuncoro, 2004: 82). Sisi fiskal seperti halnya yang berlaku dalam konteks perekonomian nasional, juga berlaku pula dalam konteks perekonomian regional. Pemerintah daerah melakukan sejumlah aktivitas berupa penarikan pajak dari masyarakat dan penyaluran transfer yang secara langsung dapat mempengaruhi kinerja perekonomian regional. Sejak diberlakukannya

desentralisasi fiskal pada tahun 2001, pemerintah daerah baik tingkat propinsi maupun tingkat kabupaten atau kota didorong untuk selalu mengefektifkan kebijakan fiskal di daerah dalam rangka salah satunya untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi regional. Hal ini dikarenakan kemajuan kinerja perekonomian di tingkat regional akan menentukan kemajuan kinerja perekonomian di tingkat nasional.

Kebijakan fiskal di daerah langsung mendapatkan tekanan tidak hanya untuk menjadi inisiator dalam mendorong laju pertumbuhan regional, akan tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fakta tentang kemampuan fiskal di daerah selama ini bahwa belum banyak daerah tingkat propinsi ataupun tingkat kabupaten/kota yang mampu secara mandiri menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di tingkat regional. Pola sentralisasi fiskal yang sebelumnya pernah dijalankan menyebabkan adanya ketergantungan daerah terhadap kemampuan fiskal di tingkat pemerintah pusat. Hampir sebagian besar kemampuan fiskal di daerah lebih banyak ditopang oleh bantuan fiskal dari pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari besarnya indikator surplus-defisit anggaran keuangan daerah dan besarnya alokasi subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Menurut laporan Dirjen Keuangan Daerah, sebagian besar daerah yang memiliki persentase Dana Perimbangan terhadap pendapatan masih di atas 70% adalah daerah di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Untuk profil daerah berdasarkan angka pertumbuhan ekonomi dan anggaran keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Profil Beberapa Daerah Yang Memiliki Persentase Dana Perimbangan di
Atas 70% Tahun 2007
(%)

No	Propinsi	PAD ¹⁾	Dana Perimbangan ²⁾	Pertumbuhan PDRB ³⁾
1	Bengkulu	48,20	70,42	5,04
2	Kepulauan Riau	47,86	72,07	5,11
3	Riau	46,71	72,29	7,86
4	Sulawesi Tenggara	46,54	76,83	7,19
5	Gorontalo	47,79	88,21	6,78
6	Sulawesi Barat	45,68	88,21	7,04
7	NTT	49,04	75,91	5,87
8	Maluku	46,51	83,67	3,52
9	Maluku Utara	47,19	91,01	3,08
10	Irian Jaya Barat	48,66	96,10	4.72

Sumber: Statistik PDRB Propinsi di Indonesia (BPS, 2004).

Keterangan:

- 1) Persentase total pos realisasi PAD terhadap total penerimaan daerah (%)
- 2) Persentase total pos dana perimbangan terhadap total penerimaan daerah (%)
- 3) Pertumbuhan PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2000 (%).

Dana perimbangan yang dimiliki oleh setiap pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota mencerminkan seberapa besar tingkat ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Semakin besar persentase dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah, maka akan semakin besar pula tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah. Pemerintah melalui Dirjen Keuangan Daerah menetapkan besarnya tingkat ketergantungan fiskal berdasarkan persentase Pos Dana Perimbangan terhadap total pendapatan daerah sebesar 70%. Anggaran pemerintah daerah dikatakan memiliki ketergantungan yang tinggi apabila persentasenya ditunjukkan di atas 70%.

Pada Tabel 1.1, Dirjen Keuangan Daerah melaporkan terdapat 10 daerah di tingkat propinsi yang memiliki ketergantungan fiskal "Tinggi". Dari sebanyak

10 daerah tersebut, sebanyak tujuh di antaranya terletak di KTI. Untuk Kawasan Barat Indonesia, hanya terdapat 3 daerah di tingkat propinsi yang memiliki persentase Dana Perimbangan terhadap total pendapatan daerah di atas 70%. Persentase pos Dana Perimbangan terhadap total pendapatan paling tinggi terdapat pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Propinsi Irian Jaya Barat di mana rata-rata persentasenya mencapai 96,1% pada tahun 2007. Apabila ditinjau dari besarnya persentase total realisasi PAD terhadap total pendapatan daerah, maka seluruh daerah tingkat propinsi seperti yang diperlihatkan pada Tabel 1.1 memiliki persentase kurang dari 50%.

Berdasarkan besarnya angka pertumbuhan PDRB, dari 10 daerah yang memiliki persentase dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah di atas 70%, hanya terdapat 4 daerah tingkat propinsi yang memiliki pertumbuhan PDRB di atas pertumbuhan PDB sebesar 6,3%, yaitu Propinsi Riau, Propinsi Sulawesi Tenggara, Propinsi Sulawesi Barat, dan Propinsi Gorontalo (lihat Tabel 1.1). Kecuali Propinsi Riau dan Propinsi Kepulauan Riau, seluruh daerah yang memiliki persentase dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah di atas 70% bergantung pada sumber penerimaan yang berasal dari sumber daya alam (Laporan Dirjen Keuangan Daerah, Tahun 2007). Untuk Propinsi Maluku, Propinsi Maluku Utara, dan Propinsi Irian Jaya Barat pada tahun 2007 memiliki laju pertumbuhan yang relatif rendah, atau hanya sedikit lebih besar ketimbang separuh laju pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu Propinsi Maluku, Propinsi Maluku Utara, dan Propinsi Irian Jaya Barat.

Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu propinsi di KTI yang termasuk cukup banyak mendapatkan sorotan semasa pelaksanaan desentralisasi fiskal. Permasalahan pokok pembangunan yang dihadapi oleh Propinsi NTT adalah persoalan kemiskinan di mana masih banyak bagian kecamatan yang terdapat di propinsi ini yang tergolong ke dalam kecamatan tertinggal (Laporan Akhir Tahun Bapenas, 2007). Potensi ekonomi daerah di Propinsi NTT masih lebih banyak menggantungkan sumber pendapatan pada pengelolaan sumber daya alam, baik yang terbaharui maupun yang tidak terbaharui. Struktur perekonomian di hampir sebagian besar daerah tingkat kabupaten masih didominasi oleh sektor ekonomi yang berbasis pada pertanian (BPS Propinsi NTT, 2006). Tantangan utama setelah daerah ini melakukan desentralisasi terhadap anggaran fiskalnya adalah tantangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di tingkat regional.

Propinsi NTT adalah propinsi yang memiliki persentase pos Dana Perimbangan terhadap total pendapatan yang paling tinggi dibandingkan daerah-daerah lain dalam kelompok daerah-daerah di Kawasan Timur Indonesia yang memiliki persentase Dana Perimbangan terhadap total pendapatan daerah di atas 70%, yaitu sebesar 75,91% (lihat Tabel 1.1). Ini berarti secara fiskal, tingkat ketergantungan anggaran pemerintah Propinsi NTT termasuk paling rendah jika dibandingkan dengan daerah-daerah yang memiliki persentase Dana Perimbangan terhadap total pendapatan daerah di atas 70%. variabel-variabel yang merupakan indikator dari kebijakan fiskal meliputi penerimaan pemerintah yang berasal dari pajak yang berpengaruh terhadap konsumsi (rumah tangga) dan investasi (swasta)

dan pengeluaran pemerintah yang terdiri dari dua jenis pengeluaran yaitu: pengeluaran rutin (operasional) dan pengeluaran pembangunan. Adapun variable-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah nilai keterbukaan perekonomian di Propinsi NTT, total realisasi penerimaan pajak daerah Propinsi NTT, dan total realisasi pengeluaran pembangunan pemerintah Propinsi NTT.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada sub bab latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh total nilai keterbukaan perekonomian Propinsi NTT, total realisasi penerimaan pajak daerah pemerintah Propinsi NTT, dan total realisasi pengeluaran pembangunan pemerintah propinsi NTT terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi NTT?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari sub bab rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sejauh mana peranan fiskal terhadap pengaruh total nilai keterbukaan perekonomian Propinsi NTT, total realisasi penerimaan pajak daerah pemerintah Propinsi NTT, dan total realisasi pengeluaran pembangunan pemerintah propinsi NTT terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi NTT.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun mengenai manfaat dari penelitian ini adalah:

- 1) Sebagai bahan referensi dan sekaligus pertimbangan bagi pemerintah daerah Propinsi NTT dalam merencanakan program-program kebijakan fiskal, termasuk dalam penyusunan strategi anggaran penerimaan dan pengeluaran daerah yang berorientasi untuk menggerakkan laju pertumbuhan ekonomi di tingkat regional.
- 2) Sebagai referensi bagi pemerintah pusat untuk melengkapi kajian dan studi mengenai pengembangan potensi pengelolaan keuangan daerah, terutama yang berorientasi untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi di tingkat regional berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi seperti nilai keterbukaan perekonomian, penerimaan pajak, dan pengeluaran pembangunan.

1.5. Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Dowling dan Hiemenz (1983) bertujuan untuk mengestimasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di beberapa negara di Asia. Pertumbuhan ekonomi merupakan isu sentral di sebagian besar negara-negara Asia terutama sejak dipopulerkannya konsep pembangunan ekonomi. Dalam penelitian tersebut, dilakukan evaluasi kritis dari sejumlah model pertumbuhan ekonomi, termasuk model estimasi yang pernah diterapkan pada penelitian sebelumnya. Dowling dan Hiemenz (1983) mengembangkan model fungsi pertumbuhan ekonomi dari Papanek (1979) dan

Mosley (1990) dengan menggunakan metode estimasi *two-stage least square*. Pengembangan dilakukan dengan menambahkan variabel-variabel penjelas dari pertumbuhan ekonomi seperti selisih ekspor dan impor untuk merepresentasikan pengaruh internasional dan peran fiskal berupa penerimaan pajak dan pengeluaran pembangunan. Variabel sebelumnya terdiri atas penanaman modal asing, investasi asing, dan tabungan masyarakat.

Hasil penelitian menemukan bahwa penanaman modal asing memberikan pengaruh yang paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi di seluruh sampel negara-negara Asia. Hasil estimasi secara individu untuk variabel penanaman modal asing ditunjukkan telah sesuai dengan hipotesis penelitian. Mobilisasi kapital di dalam negeri tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di sebagian besar negara-negara Asia yang menjadi sampel penelitian. Mobilisasi kapital ini hanya terlihat efektif di kelompok negara-negara Asia yang memiliki pertumbuhan tinggi.

Poot (1999) meneliti peran pemerintah dalam jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kajian meta analisis. Kajian seperti ini dilakukan dalam rangka menguji pembentukan model estimasi dan beberapa teori pertumbuhan endogen ke dalam studi empiris di beberapa negara di Uni Eropa. Prinsip yang digunakan untuk menjelaskan peran pemerintah dalam suatu pertumbuhan endogen adalah dengan menggunakan prinsip pada model fungsi produksi. Metode analisis yang digunakan terdiri atas regresi OLS dengan data *cross section*, regresi OLS dengan data *time series*, dan regresi OLS dengan metode *pooled cross section*.

Dengan melakukan perbandingan dari metode-metode analisis data yang digunakan dengan kesesuaian secara teoritis, akan diperoleh kepastian tentang model pertumbuhan yang dianggap paling tepat untuk menjelaskan peran pemerintah dalam kasus pertumbuhan endogen. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa model pertumbuhan yang didasarkan pada hukum Wagner dengan menggunakan pendekatan fungsi produksi dinyatakan memiliki kesesuaian yang paling tinggi secara teoritis. Hal ini terjadi pada sebagian besar negara-negara di Uni Eropa.

Bania, et al (2006) melakukan analisis pengaruh pajak dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian tersebut didasarkan pada pengembangan berbagai model pertumbuhan ekonomi yang berbasis atau menggunakan pendekatan sisi fiskal yang selama ini banyak digunakan dalam kajian publik. Bania, et al (2006) mengimplementasikan dan memodifikasikan model yang digunakan oleh Gray dan Stone (2006) untuk menjelaskan peran fiskal pemerintah dalam suatu pertumbuhan endogen. Metode analisis berupa *generalized method of moment* (GMM) digunakan untuk menerangkan pengaruh baik secara simultan maupun individu dari masing-masing variabel penjelas terhadap variabel pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian menemukan bahwa keseluruhan komponen fiskal yang meliputi variabel penerimaan pajak pemerintah dan tabungan pemerintah dinyatakan telah sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Dari pengamatan untuk beberapa negara di Uni Eropa, keseluruhannya memiliki pengaruh elastis terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk variabel kapital swasta

ditunjukkan memiliki pengaruh inelastis terhadap pertumbuhan ekonomi untuk keseluruhan negara-negara Uni Eropa.

1.6. Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Total nilai keterbukaan perekonomian Propinsi NTT berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi NTT.
- 2) Total realisasi penerimaan pajak daerah pemerintah Propinsi NTT berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi NTT.
- 3) Total realisasi pengeluaran pembangunan pemerintah Propinsi NTT berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi NTT.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1. Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder untuk periode pengamatan dari tahun 1990 – 2007 yang diperoleh dari Statistik PDRB dan Statistik APBD Daerah tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data dalam penelitian ini dimulai dari tahun 1990 dengan pertimbangan jika program untuk pemercepatan pertumbuhan ekonomi secara nasional baru dimulai kembali di awal dekade 1990an yang selanjutnya diikuti oleh pemercepatan pertumbuhan di tingkat regional. Pertimbangan

digunakannya tahun terakhir pengamatan, yaitu tahun 2007 didasarkan pada pertimbangan faktor kelengkapan data terakhir yang disediakan oleh BPS.

1.7.2. Model

Model yang digunakan dalam penelitian ini diterangkan berdasarkan dua bentuk, yaitu model teoritis dan model estimasi. Model teoritis adalah model yang dinyatakan ke dalam bentuk hubungan fungsional, yang model yang menerangkan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen sesuai dengan teori yang digunakan. Model yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari model yang digunakan pada penelitian Dowling dan Hiemenz (1983). Adapun model secara teoritis atau model yang dituliskan berdasarkan teori ekonomi adalah:

$$GR_t = f(EM_t, RT_t, GE_t) \dots\dots\dots (1.4)$$

$$f_{EM} > 0; f_{RT} \neq 0; f_{GE} > 0$$

di mana:

- GR = Pertumbuhan PDRB Propinsi NTT (persen)
- EM = Rasio keterbukaan perekonomian Propinsi NTT terhadap PDRB Propinsi NTT (persen)
- RT = Rasio total realisasi penerimaan pajak daerah pemerintah Propinsi NTT terhadap PDRB Propinsi NTT (persen)
- GE = Rasio total realisasi pengeluaran pembangunan pemerintah Propinsi NTT terhadap PDRB Propinsi NTT (persen)
- t = Periode waktu.

Dari persamaan (1.4) di atas, selanjutnya dapat di susun persamaan untuk regresi linear berganda sebagai berikut:

$$GR = a_0 + a_1 EM + a_2 RT + a_3 GE + u \dots\dots\dots(1.5)$$

di mana parameter a_0 menyatakan variabel konstan (konstanta). Parameter a_1 , a_2 , dan a_3 menyatakan koefisien dari masing-masing variabel independennya. Untuk notasi u menyatakan variabel gangguan (*disturbance error*). Variabel GR dinyatakan sebagai variabel dependen, sedangkan variabel EM, RT, dan GE masing-masing menyatakan variabel independen.

1.7.3. Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan variabel-variabel yang secara operasional didefinisikan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi Propinsi NTT

Variabel pertumbuhan ekonomi propinsi NTT didefinisikan sebagai persentase perubahan PDRB Propinsi NTT berdasarkan harga konstan tahun 2000. Untuk menghitung angka pertumbuhan ekonomi Propinsi NTT digunakan rumus sebagai berikut:

$$GR_t = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

di mana:

GR_t = Pertumbuhan ekonomi Propinsi NTT pada tahun t (%)

$PDRB_t$ = PDRB Propinsi NTT pada tahun t (juta Rupiah)

$PDRB_{t-1}$ = PDRB Propinsi NTT pada tahun sebelumnya (juta Rupiah).

2) Total Nilai Keterbukaan Perekonomian Propinsi NTT (EM)

Variabel total nilai keterbukaan perekonomian Propinsi NTT didefinisikan sebagai nilai barang-barang yang diperdagangkan keluar negeri (ekspor) dikurangi barang-barang yang didatangkan dari luar negeri ke Propinsi NTT. Nilai ekspor dan impor berdasarkan data yang diperoleh telah dinyatakan ke dalam satuan mata uang nilai Rupiah dan selanjutnya dinyatakan pula ke dalam nilai berdasarkan harga konstan tahun 2000. Adapun rumus untuk menghitung tingkat keterbukaan perekonomian Propinsi NTT berdasarkan harga konstan tahun 2000 adalah sebagai berikut:

$$EMR_t = X_t + M_t$$

di mana:

EMR_t = Total nilai keterbukaan perekonomian Propinsi NTT (juta Rupiah)

X_t = Total nilai ekspor Propinsi NTT (juta Rupiah)

M_t = Total nilai impor Propinsi NTT (juta Rupiah).

Untuk mendapatkan nilai yang dinyatakan berdasarkan harga konstan tahun 2000 dapat dipergunakan rumus sebagai berikut (Arnold, 2002: 148):

$$EM_t = \frac{EM_t \text{ Harga Berlaku}}{IHK_t} \times 100$$

di mana:

EMR_t = Total nilai keterbukaan perekonomian Propinsi NTT berdasarkan harga konstan (juta Rupiah)

IHK_t = Indeks harga konsumen (Kota Kupang).

Untuk menghitung tingkat keterbukaan perekonomian di Propinsi NTT yang dinyatakan sebagai rasio keterbukaan perekonomian Propinsi NTT terhadap PDRB Propinsi NTT digunakan rumus:

$$EM_t = \frac{EMR_t}{PDRB_t} \times 100\%$$

di mana:

EM_t = Tingkat keterbukaan perekonomian Propinsi NTT (persen)

EMR_t = Tingkat keterbukaan perekonomian Propinsi NTT berdasarkan harga konstan (juta Rupiah)

$PDRB_t$ = Produk Domestik Regional Bruto Propinsi NTT berdasarkan harga konstan (juta Rupiah).

- 3) Total Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Propinsi NTT (RT)
- Variabel ini dinyatakan sebagai total realisasi penerimaan pemerintah Propinsi NTT yang berasal dari Pos Pajak Daerah di mana nilainya dinyatakan dalam satuan juta Rupiah. Komponen-komponen yang menjadi bagian dari Pos Pajak Daerah Pemerintah Propinsi di atur dalam Undang-Undang No 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang No 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah. Nilai realisasi yang diperoleh dari laporan anggaran pemerintah daerah merupakan nilai berdasarkan harga berlaku. Untuk merubah ke dalam nilai berdasarkan harga konstan tahun 2000 dipergunakan rumus sebagai berikut (Arnold, 2002: 148):

$$RTR_t = \frac{RT_t \text{ Harga Berlaku}}{IHK_t} \times 100$$

di mana:

RTR_t = Total realisasi penerimaan pajak daerah pemerintah Propinsi NTT berdasarkan harga konstan (juta Rupiah)

IHK_t = Indeks harga konsumen (Kota Kupang).

Untuk menghitung rasio total realisasi penerimaan pajak daerah Propinsi NTT terhadap PDRB Propinsi NTT digunakan rumus:

$$RT_t = \frac{RTR_t}{PDRB_t} \times 100\%$$

di mana:

RT_t = Rasio realisasi penerimaan pajak daerah pemerintah Propinsi NTT terhadap PDRB Propinsi NTT (persen)

RTR_t = Total realisasi penerimaan pajak daerah pemerintah Propinsi NTT berdasarkan harga konstan (juta Rupiah)

$PDRB_t$ = Produk Domestik Regional Bruto Propinsi NTT berdasarkan harga konstan (juta Rupiah).

- 4) Total Realisasi Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Propinsi NTT (GE)
- Variabel total nilai pengeluaran pembangunan pemerintah Propinsi NTT didefinisikan sebagai realisasi total pengeluaran pemerintah Propinsi NTT untuk pos Pengeluaran Pembangunan yang dinyatakan ke dalam satuan juta Rupiah. Angka yang diperoleh berdasarkan laporan keuangan pemerintah Propinsi NTT merupakan nilai yang dinyatakan berdasarkan

harga berlaku. Adapun untuk mengubah ke dalam nilai berdasarkan harga konstan dipergunakan rumus sebagai berikut (Arnold, 2002: 148):

$$GER_t = \frac{GE_t \text{ Harga Berlaku}}{IHK_t} \times 100$$

di mana:

GE_t = Total realisasi pengeluaran pembangunan pemerintah Propinsi NTT berdasarkan harga konstan (juta Rupiah)

IHK_t = Indeks harga konsumen (Kota Kupang).

Untuk menghitung rasio total realisasi pengeluaran pembangunan pemerintah Propinsi NTT terhadap PDRB Propinsi NTT digunakan rumus:

$$GE_t = \frac{GER_t}{PDRB_t} \times 100\%$$

di mana:

GE_t = Rasio realisasi pengeluaran pembangunan pemerintah Propinsi NTT terhadap PDRB Propinsi NTT (persen)

RTR_t = Total realisasi pengeluaran pembangunan pemerintah Propinsi NTT berdasarkan harga konstan (juta Rupiah)

$PDRB_t$ = Produk Domestik Regional Bruto Propinsi NTT berdasarkan harga konstan (juta Rupiah).

1.7.4 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode estimasi berupa metode *OLS* atau *ordinary least square*. Metode ini dianggap cukup memadai untuk melakukan estimasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Propinsi NTT dengan memperhatikan indikator uji-F, dan uji-t. koefisien determinasi (R^2), Metode OLS dalam penelitian dituliskan sebagai berikut (Gujarati, 2003: 205):

$$E(GR | EM_i, RT_i, GE_i) = \beta_0 + \beta_3 EM_i + \beta_4 RT_i + \beta_5 GE_i \dots \dots \dots (1.6)$$

Pada persamaan (1.6) menunjukkan adanya rata-rata atau nilai yang diharapkan (*expected value*) bersyarat dari GR di mana syarat nilai dari EM, RT dan GE adalah tetap atau tertentu. Persamaan (1.6) memberikan rata-rata atau nilai yang diharapkan (*expected value*) bersyarat dari PDRB di mana syarat nilai dari EM, RT, dan GE adalah tetap atau tertentu. Untuk keperluan dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis regresi bersyarat yang mensyaratkan nilai variabel penjelas yang tetap. Apa yang diperoleh adalah nilai rata-rata PDRB untuk nilai-nilai variabel-variabel independen yang tetap. Untuk mendukung metode penelitian ini, langkah-langkah pengujian terdiri atas tahap-tahap dalam uji asumsi klasik dan tahap-tahap dalam uji statistik yang akan dibahas pada sub bagian berikut ini.

1.7.4.1 Uji Asumsi Klasik

Prosedur pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi dua tahapan, yaitu prosedur pengujian adanya pelanggaran asumsi klasik dan uji statistik. Uji asumsi klasik akan mengawali serangkaian pengujian sebelum dilakukan langkah pengujian statistik. Uji statistik merupakan bagian utama dari analisis dalam penelitian ini untuk menerangkan hubungan antara variabel-variabel bebas penelitian dengan variabel tidak bebas. Adapun Langkah-langkah pengujian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Uji Asumsi Klasik

Langkah pengujian terhadap pelanggaran asumsi klasik atau uji asumsi klasik digunakan untuk menjelaskan adanya suatu fenomena ekonomi secara lebih akurat, yaitu dengan memperhatikan adanya kemungkinan-kemungkinan pelanggaran terhadap asumsi klasik. Adapun urutan atau tahapan dalam uji asumsi klasik adalah autokorelasi, heteroskedastisitas, dan multikolinieritas. Bila dalam pengujian dijumpai adanya pelanggaran, maka sesuai dengan ketentuan harus diperbaiki terlebih dahulu dengan menggunakan metode-metode perbaikan tertentu sebelum dilakukan langkah uji statistik.

1.7.4.1.1. Uji Autokorelasi

Asumsi klasik berupa autokorelasi diterangkan sebagai suatu korelasi (hubungan) yang terjadi di antara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu (seperti pada data runtut waktu atau *time series data*) atau yang tersusun dalam rangkaian ruang (seperti pada data silang waktu atau *cross-sectional data*). (Gujarati, 2003: 460). Salah satu asumsi penting metode OLS adalah tidak adanya hubungan antara residul satu dengan residul yang lain.

Autokorelasi dapat timbul karena berbagai macam alasan. Asumsi ini tidak terpenuhi jika terdapat nilai gangguan pada periode t (U_t) pada setiap periode berkorelasi dengan nilai-nilai gangguan pada periode sebelumnya (U_{t-1}) atau terjadi autokorelasi dari variabel-variabel random.

Untuk melihat kemungkinan terjadinya penyimpangan asumsi klasik berupa autokorelasi, penelitian ini menggunakan Metode *Bruesch-Godfrey LM test* dalam pengujian ini.

Uji ini dilakukan dengan meregres variabel pengganggu menggunakan autoregressive model dengan orde p : $\mu_t = \rho_1 \mu_{t-1} + \rho_2 \mu_{t-2} + \dots + \rho_n \mu_{t-n} + \epsilon$. Dimana $\rho = \rho_1 = \rho_2 = \rho_n = 0$, koefisien autoregressive secara simultan pada setiap periode.

1.7.4.1.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji berlakunya asumsi homoskedastisitas dalam suatu model pengamatan. Salah satu asumsi pokok dalam model regresi linier klasik adalah bahwa varian setiap *disturbance term* yang dibatasi oleh nilai tertentu mengenai variabel-variabel bebas adalah berbentuk suatu nilai konstan yang sama dengan σ^2 . Penyimpangan atas asumsi ini disebut sebagai gejala varian yang berbeda atau heteroskedastisitas (Gujarati, 2003: 387). Metode uji-White menggunakan teknik regresi auxiliari untuk membentuk persamaan atau model uji-White. Tahap-tahap uji-White adalah (Gujarati, 2003: 413-414):

1) Melakukan estimasi terhadap persamaan model utama, yaitu model pada persamaan (1.5) untuk mendapatkan nilai residual yang selanjutnya disimpan dengan nama $RESW_t$.

2) Melakukan estimasi terhadap persamaan uji-White sebagai berikut:

$$(RESW)^2 = b_0 + b_1 EM + b_2 (EM)^2 + b_3 (EM \times RT) + b_4 (EM \times GE) + b_5 RT + b_6 (RT)^2 + b_7 (RT \times GE) + b_8 GE + b_9 (GE)^2 + \gamma \dots \dots \dots (1.7)$$

3) Menetapkan hipotesis nol (H_0):

H_0 : Tidak terdapat heteroskedastisitas.

Untuk menyatakan menolak atau tidak menolak H_0 digunakan ketentuan yang terdapat pada distribusi *chi-square* (χ^2). Besarnya sampel pengamatan (n) dan nilai R^2 mengikuti pola distribusi *chi-square* dengan derajat kebebasan atau *degree of freedom* (df) sebanyak regresornya tidak

termasuk variabel konstan pada model uji. Adapun rumus untuk menghitung χ^2 adalah:

$$n \cdot R^2 \sim \chi_{df}^2$$

di mana:

n = banyaknya pengamatan

R^2 = koefisien determinasi

χ^2 = *chi-square*

df = derajat kebebasan (*degree of freedom*).

- 4) Jika nilai *chi-square* hitung yang diperoleh dari rumus di atas lebih besar daripada batas kritisnya pada tingkat signifikansi tertentu, maka kesimpulan yang diperoleh adalah menolak hipotesis nol atau dinyatakan terdapat heteroskedastisitas. Sebaliknya, apabila nilai *chi-square* lebih kecil daripada batas kritisnya, maka tidak menolak H_0 atau dinyatakan tidak terdapat heteroskedastisitas.

1.7.4.1.3. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah situasi di mana terdapat korelasi variabel-variabel bebas di antara satu dengan lainnya. Dalam hal ini variabel – variabel tersebut tidak orthogonal. Variabel yang bersifat orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesamanya sama dengan nol (Gujarati, 2003: 342). Pengujian terhadap gejala multikolinearitas dipilih menggunakan metode pengujian parsial atau melakukan pengujian dengan *auxiliary regression*.

Adapun model uji auxiliari untuk model linear dituliskan sebagai berikut:

$$EM = f(RT, GE) \dots\dots\dots (1.8)$$

$$RT = f(EM, GE) \dots\dots\dots (1.9)$$

$$GE = f(EM, RT) \dots\dots\dots(1.10)$$

Kriteria sederhana untuk menentukan multikolinearitas adalah dengan memperhatikan signifikansi nilai statistik dari F dan t. Jika keduanya menghasilkan nilai yang tidak signifikan, maka tidak terjadi bentuk pelanggaran multikolinearitas. Metode penilaian alternatif yang dikenal dengan *Klien's Rule of Thumb* jika nilai R^2 hasil regresi dari auxiliari lebih kecil daripada R^2 model awal maka multikolinearitas yang terjadi dikatakan tidak bermasalah atau dapat diabaikan (Gujarati, 2003: 361).

1.7.4.2. Uji Statistik

Uji statistik atau disebut juga uji orde pertama (*first order test*) merupakan bagian dari tahapan-tahapan metode penelitian yang terdiri uji-F, uji-t atau uji individu dan koefisien determinasi atau disebut juga R^2 , atau disebut juga uji secara simultan, dan Adapun penjelasannya diterangkan berikut ini.

1.7.4.2.1. Uji-F

Nilai distribusi-F yang dideskripsikan dalam tabel *analysis of variance* atau ANOVA menyatakan seberapa besar pengaruh keseluruhan variabel bebas terhadap variabel tidak bebas pada tingkat signifikansi tertentu. Pola dalam distribusi F identik atau memiliki keterkaitan dengan nilai R^2 . Apabila spesifikasi

model yang digunakan adalah model linear, maka nilai F-statistik dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Gujarati, 2003: 254-257):

$$\begin{aligned}
 F &= \frac{ESS/df}{RSS/df} = \frac{ESS/(k-1)}{RSS/(n-k)} = \frac{n-k}{k-1} \cdot \frac{ESS}{(TSS-ESS)} \\
 &= \frac{n-k}{k-1} \cdot \frac{ESS/TSS}{1-(ESS/TSS)} \\
 &= \frac{n-k}{k-1} \cdot \frac{R^2}{1-R^2} \\
 &= \frac{R^2/(k-1)}{(1-R^2)/(n-k)}
 \end{aligned}$$

di mana:

R^2 : besarnya koefisien determinasi

n : banyaknya pengamatan atau observasi

k : banyaknya parameter yang ada dalam model di mana salah satunya adalah intersep

ESS : *Explained Sum of Squares* (jumlah kuadrat yang dijelaskan)

RSS : *Residual Sum of Squares* (jumlah kuadrat residual)

TSS : *Total Sum of Squares* (jumlah total dari kuadrat yang dijelaskan dan kuadrat residual).

Hipotesis nol untuk uji-F dinyatakan sebagai berikut:

$$H_0 : a_1 = a_2 = a_3 = 0$$

Artinya, tidak ada pengaruh secara bersama-sama dari semua variabel bebas terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi NTT. Sedangkan hipotesis alternatif dituliskan:

$$H_a : a_1 \neq a_2 \neq a_3 \neq 0$$

Artinya, ada pengaruh secara bersama-sama dari semua variabel bebas terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi NTT. Bila $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak, ini berarti keseluruhan variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel tidak bebas. Sebaliknya, bila pada tingkat signifikansi (α) tertentu, $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$, maka H_0 tidak ditolak yang berarti semua variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tidak bebas.

1.7.4.2.2. Uji-t

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel tidak bebas secara individu. Metode untuk menyatakan penolakan maupun penerimaan hipotesis nol didasarkan pada metode uji dua sisi atau *two tail test*. Adapun hipotesis untuk menolak maupun menerima hipotesis dijelaskan sebagai berikut:

$$H_0 : a_i = 0$$

Artinya tidak ada pengaruh dari masing-masing variabel bebas (secara parsial) terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi NTT.

$$H_a : a_i \neq 0$$

Artinya ada pengaruh dari masing-masing variabel bebas (secara parsial) terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi NTT.

Hipotesis ini digunakan apabila tanda parameter estimasinya bisa positif maupun negatif.

$$H_a : a_i > 0$$

Artinya ada pengaruh positif dan signifikan dari masing-masing variabel independen (secara parsial) terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi NTT.

Hipotesis dalam uji-t atau uji individu didasarkan pada pendekatan pengujian hipotesis dari metode pengujian signifikansi yang dikembangkan oleh *R.A. Fisher* dan *Newman-Pearson* (*Gujarati*, 2003: 129). Prosedur pengujian signifikansi tersebut digunakan untuk mengetahui apakah kriteria pengujian dinyatakan memenuhi hipotesis nol atau tidak. Keputusan untuk menolak atau tidak menolak hipotesis nol didasarkan pada nilai uji t-statistik yang diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{\hat{a}_i - a_i}{se(\hat{a}_i)}$$

Karena diketahui hipotesis nol (H_0) menyatakan $a_i=0$, maka:

$$t = \frac{\hat{a}_i}{se(\hat{a}_i)}$$

di mana:

t = nilai t-statistik

a_i = parameter dari masing-masing variabel penjelas

\hat{a}_i = koefisien estimasi (estimator) dari masing-masing variabel penjelas

$se(\hat{a}_i)$ = nilai *standard error* parameter estimasi.

Setelah diketahui nilai t-statistik dengan menggunakan rumus di atas, selanjutnya akan dilakukan kriteria pengujian untuk menolak dan tidak menolak hipotesis nol (H_0). Pada pendekatan pengujian signifikansi, kriteria untuk

menolak ataupun tidak menolak hipotesis nol didasarkan pada batas kritis untuk distribusi nilai t-statistik. Untuk uji-t dengan metode uji dua sisi (*two-tail test*), batas kritis untuk tingkat signifikansi sebesar $\alpha/2$ dan derajat kebebasan (df) sebesar N-k adalah:

$$\pm t_{\alpha/2;df}$$

di mana:

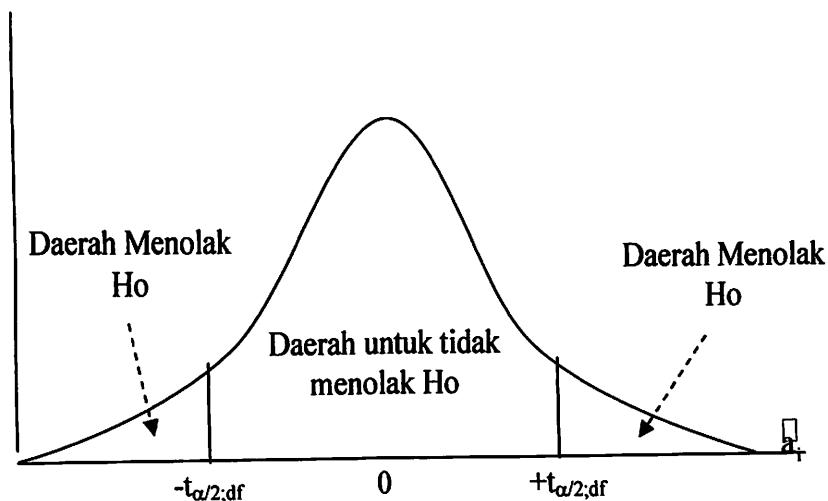
α = tingkat signifikansi (persen)

df = derajat kebebasan (N-k)

N = banyaknya pengamatan

k = banyaknya variabel penjelas termasuk konstanta.

Secara grafis, batas kritis untuk uji-t diilustrasikan pada Gambar 1.2 berikut ini:



Gambar 1.2
Batas Kritis Penolakan dan Penerimaan Ho Pada Uji-t

Sumber: Gujarati (2003: 130)

Hipotesis nol (H_0) ditolak apabila (Gujarati, 2003: 131-132):

$$t\text{-statistik} < -t_{\alpha/2;df}$$

atau

$$t\text{-statistik} > +t_{\alpha/2;df}$$

Dalam hal ini berlaku untuk tidak menolak H_a .

Hipotesis nol (H_0) tidak ditolak apabila:

$$-t_{\alpha/2;df} \leq t\text{-statistik} \leq t_{\alpha/2df}$$

Jika kesimpulan yang diperoleh adalah menolak hipotesis nol atau tidak menolak H_0 , maka variabel bebas secara individual berpengaruh signifikan terhadap variabel tidak bebas pada tingkat signifikansi sebesar α . Sebaliknya, apabila kesimpulan yang diperoleh adalah tidak menolak hipotesis nol, maka variabel bebas secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel tidak bebas pada tingkat signifikansi sebesar α .

Hipotesis nol seperti yang dinyatakan dalam penelitian ini merupakan pengujian dasar secara empiris yang ditunjukkan sebagai $H_0: a_i = 0$ di mana slope dari koefisien ditunjukkan sebesar nol (Gujarati, 2003: 134-135). Angka nol dari hipotesis nol menunjukkan suatu bentuk pernyataan yang secara obyektif mencari tahu apakah variabel tidak bebas menyatakan hubungan dengan variabel bebas atau tidak. Jika tidak terdapat adanya hubungan antara variabel tidak bebas dan variabel bebas, maka pengujian hipotesis dinyatakan tidak sama dengan nol.

1.7.4.2.3. Koefisien Determinasi R^2

Koefisien determinasi atau R^2 dikatakan sebagai ukuran kesesuaian yang baik atau *Goodness of Fit*, koefisien determinasi merupakan ukuran ikhtisar yang menyatakan seberapa baik garis regresi sampel dalam mencocokkan penyebaran datanya (Gujarati, 2003: 212). Nilai koefisien determinasi yang dinyatakan sebagai R^2 menerangkan variasi variabel tidak bebas yang dapat dijelaskan oleh

variasi yang terdapat variabel bebas. Nilai koefisien determinasi yang dinyatakan sebagai R^2 dapat dihitung dengan rumus (Sumodiningrat, 1994: 125-126):

$$R^2 = 1 - \frac{RSS}{TSS} = \frac{ESS}{TSS} = 1$$

di mana:

R^2 = koefisien determinasi

\hat{u}_i = nilai taksiran atas residual

RSS = *residual sum of squares*

ESS = *explained sum of squares*

TSS = total sum of squares.

Jika R^2 sebesar satu, berarti ada kecocokan sempurna antara variabel bebas dan variabel tidak bebas. Jika R^2 bernilai nol berarti tidak ada hubungan antara variabel bebas dan variabel tidak bebas. Kecocokan suatu model dikatakan lebih baik jika R^2 semakin mendekati satu (1).

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, studi terkait, hipotesis penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada Bab II akan dibahas mengenai teori-teori yang mendasari penelitian, yaitu teori mengenai pertumbuhan ekonomi, anggaran pemerintah, dan pengaruh fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.

BAB III PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN PROPINSI NTT

Gambaran umum dalam penelitian ini menyajikan uraian perkembangan utang luar negeri pemerintah dan kompoenen-komponen yang mempengaruhi PDRB Propinsi NTT seperti penanaman modal asing, tabungan masyarakat, selisih ekspor dan impor, pajak daerah, dan pengeluaran pembangunan.

BAB IV ANALISIS DATA

Bab IV yang bersikan analisis data menerangkan hasil analisis yang dilakukan dan disertai pembahasan terhadap hasil yang diperoleh.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, akan disampaikan kesimpulan dari data yang dianalisis dan saran-saran untuk masa yang akan datang